



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 341 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

- tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 6. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 341 TAHUN 2022
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
 DINAMIS DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK
 INDONESIA

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
IN	I	INTELIJEN					
IN.00	1.	Perumusan Kebijakan Intelijen					
		- Perumusan kebijakan intelijen bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan, sektor cegah tangkal, pengawasan orang asing, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan dan pengamanan pembangunan strategis, teknologi informasi dan produksi intelijen - Penyiapan bahan - Telaah	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian masukan dan pemberian dukungan - Pengumpulan dan pengolahan data - Laporan 					
IN.01	2.	Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen					
IN.01.00		a. Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen A.1 (Sektor ideologi)	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
IN.01.01		b. Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen A.2 (Sektor Politik)	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
IN.01.02		c. Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen A.3 (Sektor Pertahanan dan Keamanan)	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
IN.01.03		d. Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen A.4 (Sektor Cegah Tangkal, Pengawasan Orang Asing, Pengamanan Sumber Daya Organisasi Kejaksaan dan Pengamanan Penanganan Perkara)	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
IN.01.04		e. Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen B.1 (Sektor Peredaran Barang Cetakan dan Media Komunikasi)	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
IN.01.05		f. Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen B.2 (Sektor Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Aliran Keagamaan serta Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama)	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
IN.01.06		g. Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen B.3 (Sektor Ketahanan Budaya, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengawasan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat)	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
IN.01.07		h. Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen B.4 (Sektor Pencegahan Konflik Sosial, Ketertiban dan Ketenteraman Umum serta Pembinaan Masyarakat Taat Hukum)	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
IN.01.08		i. Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen C.1 (Sektor Keuangan dan Kekayaan Negara)	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Ekonomi dan Keuangan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
IN.01.09		j. Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen C.2 (Sektor Investasi dan Penerimaan Negara)	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Ekonomi dan Keuangan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
IN.01.10		k. Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen C.3 (Sektor Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan)	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Ekonomi dan Keuangan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
IN.01.11		i. Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen C.4 (Sektor Sumber Daya Alam dan Agraria/Tata Ruang)	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Ekonomi dan Keuangan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
IN.01.12		m. Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen D.1 (Sektor Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Transportasi dan Telekomunikasi)	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
IN.01.13		n. Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen D.2 (Sektor Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Pengairan, Pertanian dan Kelautan)	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
IN.01.14		o. Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen D.3 (Sektor Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Energi, Sumber Daya Alam dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
IN.01.15		p. Perencanaan dan Pelaksanaan Intelijen D.4 (Sektor Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Kawasan dan Sektor Pembangunan Lainnya)	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
IN.02	3.	Pengelolaan Produk Intelijen					
IN.02.00		a. Perkiraan Keadaan Intelijen	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
IN.02.01		b. Pemetaan Potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
IN.02.02		c. Pemeliharaan Perangkat Intelijen	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
IN.02.03		d. Bank Data Intelijen	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
IN.03	4.	Pemantauan Kegiatan Intelijen					
IN.03.00		a. Penanganan Tangkap Buron	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
IN.03.01		b. Penanganan Digital Forensik	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
IN.04	5.	Pengamanan Informasi Intelijen					
IN.04.00		a. Transmisi Berita Sandi	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
IN.04.01		b. Kontra Penginderaan	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
IN.04.02		c. Kontra Intelijen	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
IN.04.03		d. Audit dan Pengujian Sistem Informasi	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
IN.05	6.	Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi					
IN.05.00		a. Pengembangan Sumber Daya Manusia Intelijen	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
IN.05.01		b. Pengembangan Perangkat Intelijen	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
IN.05.02		c. Pemeliharaan Perangkat Intelijen	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
IN.06	7.	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Intelijen					
IN.06.00		a. Pembinaan Intelijen	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
IN.06.01		b. Bimbingan Teknis Intelijen	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
IN.07	8.	Rekomendasi/Keterangan Bebas dari Masalah Hukum	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator	Instansi lain yang terkait dengan pemberian surat rekomendasi (keterangan)	Menyangkut <i>personal file</i> dan menyangkut rahasia pribadi	Subbagian Umum pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
IN.08	9.	Perizinan Senjata	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator	Instansi lain sebagai Pejabat Penguji	Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya	Subbagian Umum pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
PU	II	TINDAK PIDANA UMUM					
PU.00	1.	Perumusan kebijakan Bidang Penegakan Hukum Tindak Pidana Umum					
		Perumusan kebijakan terkait Bidang Tindak Pidana Umum - Penyiapan bahan - Telaah - Pemberian masukan dan pemberian dukungan - Pengumpulan dan pengelolaan data - Laporan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
PU.01	2.	Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda					
PU.01.00		a. Prapenuntutan Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.01.01		b. Praperadilan Tindak Pidana Dalam KUHP dan Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.01.02		c. Penuntutan Tindak Pidana Dalam KUHP dan Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.01.03		d. Eksekusi Tindak Pidana Dalam KUHP dan Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.01.04		e. Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.01.05		f. Eksaminasi Tindak Pidana Dalam KUHP dan Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.02	3.	Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum					
PU.02.00		a. Prapenuntutan Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.02.01		b. Praperadilan Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.02.02		c. Penuntutan Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.02.03		d. Eksekusi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.02.04		e. Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.02.05		f. Eksaminasi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.03	4.	Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan					
PU.03.00	a.	Eksekusi Tindak Pidana Ringan	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.03.01	b.	Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.03.02		c. Eksaminasi Tindak Pidana Ringan	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.04	5.	Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas					
PU.04.00		a. Eksekusi Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.04.01		b. Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.04.02		c. Eksaminasi Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.05	6.	Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika					
PU.05.00		a. Prapenuntutan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.05.01		b. Praperadilan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.05.02		c. Penuntutan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.05.03		d. Eksekusi Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.05.04		e. Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.05.05		f. Eksaminasi Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.06	7.	Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Kesehatan					
PU.06.00		a. Prapenuntutan Tindak Pidana Kesehatan	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.06.01		b. Praperadilan Tindak Pidana Kesehatan	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.06.02		c. Penuntutan Tindak Pidana Kesehatan	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.06.03		d. Eksekusi Tindak Pidana Kesehatan	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.06.04		e. Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.06.05		f. Eksaminasi Tindak Pidana Kesehatan	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.07	8.	Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Keuangan					
PU.07.00		a. Prapenuntutan Tindak Pidana Keuangan	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.07.01		b. Praperadilan Tindak Pidana Keuangan	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.07.02		c. Penuntutan Tindak Pidana Keuangan	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.07.03		d. Eksekusi Tindak Pidana Keuangan	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.07.04		e. Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.07.05		f. Eksaminasi Tindak Pidana Keuangan	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.08	9.	Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Siber					
PU.08.00		a. Prapenuntutan Tindak Pidana Siber	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.08.01		b. Praperadilan Tindak Pidana Siber	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.08.02		c. Penuntutan Tindak Pidana Siber	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.08.03		d. Eksekusi Tindak Pidana Siber	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.08.04		e. Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.08.05		f. Eksaminasi Tindak Pidana Siber	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.09	10.	Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Sumber Daya Alam					
PU.09.00		a. Prapenuntutan Tindak Pidana Sumber Daya Alam	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.09.01		b. Praperadilan Tindak Pidana Sumber Daya Alam	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.09.02		c. Penuntutan Tindak Pidana Sumber Daya Alam	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.09.03		d. Eksekusi Tindak Pidana Sumber Daya Alam	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.09.04		e. Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.09.05		f. Eksaminasi Tindak Pidana Sumber Daya Alam	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.10	11.	Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Terorisme					
PU.10.00		a. Prapenuntutan Tindak Pidana Terorisme	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.10.01		b. Praperadilan Tindak Pidana Terorisme	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.10.02		c. Penuntutan Tindak Pidana Terorisme	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.10.03		d. Eksekusi Tindak Pidana Terorisme	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.10.04		e. Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.10.05		f. Eksaminasi Tindak Pidana Terorisme	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.11	12.	Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana terhadap Perempuan, Anak dan Perdagangan Orang					
PU.11.00		a. Prapenuntutan Tindak Pidana terhadap Perempuan, Anak dan Perdagangan Orang	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.11.01		b. Praperadilan Tindak Pidana terhadap Perempuan, Anak dan Perdagangan Orang	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.11.02		c. Penuntutan Tindak Pidana terhadap Perempuan, Anak dan Perdagangan Orang	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.11.03		d. Eksekusi Tindak Pidana terhadap Perempuan, Anak dan Perdagangan Orang	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.11.04		e. Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.11.05		f. Eksaminasi Tindak Pidana terhadap Perempuan, Anak dan Perdagangan Orang	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya; - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.12	13.	Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual					
PU.12.00		a. Prapenuntutan Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.12.01		b. Praperadilan Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.12.02		c. Penuntutan Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.12.03		d. Eksekusi Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.12.04		e. Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.12.05		f. Eksaminasi Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.13	14.	Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya					
PU.13.00		a. Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Lainnya	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.13.01		b. Praperadilan Tindak Pidana Umum Lainnya	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3		4	5	6	7	8
PU.13.02		c.	Penuntutan Tindak Pidana Umum Lainnya	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.13.03		d.	Eksekusi Tindak Pidana Umum Lainnya	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.13.04		e. Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.13.05		f. Eksaminasi Tindak Pidana Umum Lainnya	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PU.14	15.	Penegakan Hukum Perkara yang di Hentikan Penuntutannya Berdasarkan Keadilan Restoratif	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PU.15	16.	Rekomendasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) <ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan - Nota Pendapat - Surat Perintah 	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
KH	III	TINDAK PIDANA KHUSUS					
KH.00	1.	Perumusan Kebijakan Bidang Penegakan Hukum Tindak Pidana Khusus					
		Perumusan Kebijakan Terkait Bidang Tindak Pidana Khusus <ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan bahan - Telaah - Pemberian masukan dan pemberian dukungan - Pengumpulan dan pengelolaan data - Laporan 	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Madya - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KH.01	2.	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang					
KH.01.00		a. Laporan dan Pengaduan Masyarakat Tindak Pidana Korupsi	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Penyidikan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
KH.01.01		b. Hasil Analisis terkait Tindak Pidana Korupsi dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Sangat Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Apabila informasi diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Penyidikan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
KH.01.02		c. Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Penyidikan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KH.01.03		d. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Penyidikan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
KH.01.04		e. Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Penyidikan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
KH.01.05		f. Praperadilan, Gugatan, Permohonan serta Tindakan Lain terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Penyidikan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KH.01.06		g. Prapenuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Penuntutan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
KH.01.07		h. Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Penuntutan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
KH.01.08		i. Upaya Hukum Biasa Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang - Upaya Hukum Banding Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang - Upaya Hukum Kasasi Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Penuntutan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KH.01.09		j. Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
KH.01.10		k. Upaya Hukum Luar Biasa Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang <ul style="list-style-type: none"> - Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang - Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang 	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
KH.01.11		l. Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Penuntutan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KH.01.12		m. Eksaminasi Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi - Kejaksaan Tinggi
KH.02	3.	Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang					
KH.02.00		a. Laporan dan Pengaduan Masyarakat Tindak Pidana Perpajakan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Direktorat Penyidikan
KH.02.01		b. Praperadilan, Gugatan, Permohonan serta Tindakan lain terkait Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Penuntutan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KH.02.02		c. Prapenuntutan Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Penuntutan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
KH.02.03		d. Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Penuntutan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
KH.02.04		e. Upaya Hukum Biasa Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang <ul style="list-style-type: none"> - Upaya Hukum Banding Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang - Upaya Hukum Kasasi Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang 	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KH.02.05		f. Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Eksekusi Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
KH.02.06		g. Upaya Hukum Luar Biasa Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian uang <ul style="list-style-type: none"> - Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang - Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang 	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
KH.02.07		h. Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Penuntutan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KH.02.08		i. Eksaminasi Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
KH.03	4.	Penanganan Perkara Tindak Pidana Kepabeanaan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang					
KH.03.00		a. Laporan dan Pengaduan Masyarakat Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Kepala Satuan Kerja - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Direktorat Penyidikan
KH.03.01		b. Praperadilan, Gugatan, Permohonan serta Tindakan Lain terkait Tindak Pidana Kepabeanaan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Penuntuan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KH.03.02		c. Prapenuntutan Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Penuntuan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
KH.03.03		d. Penuntutan Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian uang	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Penuntuan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
KH.03.04		e. Upaya Hukum Biasa Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang <ul style="list-style-type: none"> - Upaya Hukum Banding Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang - Upaya Hukum Kasasi Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang 	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Penuntuan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KH.03.05		f. Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Eksekusi Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
KH.03.06		g. Upaya Hukum Luar Biasa Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian uang <ul style="list-style-type: none"> - Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang - Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang 	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
KH.03.07		h. Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Penuntutan - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KH.03.08		i. Eksaminasi Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
KH.04	5.	Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat					
KH.04.00		a. Laporan dan Pengaduan Masyarakat Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat HAM Berat - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri
KH.04.01		b. Prapenyidikan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat HAM Berat - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri
KH.04.02		c. Penyidikan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat HAM Berat - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KH.04.03		d. Praperadilan, Gugatan, Permohonan serta Tindakan Lain Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat HAM Berat - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri
KH.04.04		e. Prapenuntutan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat HAM Berat - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri
KH.04.05		f. Penuntutan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat HAM Berat - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri
KH.04.06		g. Upaya Hukum Biasa Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat - Upaya Hukum Banding Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat - Upaya Hukum Kasasi Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat HAM Berat - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KH.04.07		h. Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Eksekusi Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat HAM Berat - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri
KH.04.08		i. Upaya Hukum Luar Biasa Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat <ul style="list-style-type: none"> - Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat - Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat 	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
KH.04.09		j. Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pejabat Pengawas (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KH.04.10		k. Eksaminasi Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri
KH.05	6.	Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal, Penegak Hukum - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi - Kejaksaan Tinggi
DT	IV	PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA					
DT.00	1	Perumusan Kebijakan Bidang Penegakan Hukum Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara					
		Perumusan Kebijakan terkait Bidang Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara - Penyiapan bahan - Telaah - Pemberian masukan dan pemberian dukungan - Pengumpulan dan pengolahan data - Laporan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
DT.01	2.	Penanganan Perkara Perdata					
DT.01.00	a.	Bantuan Hukum Penyelamatan Perkara Perdata	Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Madya - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro - Informasi yang terdapat dalam arsip bersifat sensitif bagi lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
DT.01.01		b. Bantuan Hukum Pemulihan Perkara Perdata	Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Madya - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro - Informasi yang terdapat dalam arsip bersifat sensitif bagi lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
DT.01.02		c. Bantuan Hukum Arbitrase	Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Madya - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro - Informasi yang terdapat dalam arsip bersifat sensitif bagi lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
DT.01.03		d. Penegakan Hukum Perkara Perdata	Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Madya - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro - Informasi yang terdapat dalam arsip bersifat sensitif bagi lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
DT.02	3.	Penanganan Perkara Tata Usaha Negara					
DT.02.00		a. Bantuan Hukum Tata Usaha Negara	Biasa/Terbuka	Seluruh Pengguna Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Direktorat Tata Usaha Negara - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
DT.02.01		b. Penyelenggaraan Pemerintahan Tata Usaha Negara	Rahasia	- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	- Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro - Informasi yang terdapat dalam arsip bersifat sensitif bagi lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif,	- Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
						hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	
DT.02.02		c. Bantuan Hukum Uji Materiil Tata Usaha Negara (Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi)	Biasa/Terbuka	Seluruh Pengguna Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Direktorat Tata Usaha Negara - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
DT.02.03		d. Pelayanan Hukum Tata Usaha Negara	Biasa/Terbuka	Seluruh Pengguna Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Direktorat Tata Usaha Negara - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
DT.03	4.	Pertimbangan Hukum					
DT.03.00		a. Pendapat Hukum	Rahasia	- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	- Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum, termasuk	- Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
						dampak ekonomi makro - Informasi yang terdapat dalam arsip bersifat sensitif bagi lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	
DT. 03.01		b. Pendampingan dan Audit Hukum	Rahasia	- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	- Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	- Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
						<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang terdapat dalam arsip bersifat sensitif bagi lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi 	
DT.03.02		c. Tindakan Hukum Lain (Fasilitasi, Mediasi, dan Konsiliasi)	Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Madya - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro - Informasi yang terdapat dalam arsip bersifat 	<ul style="list-style-type: none"> - Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara - Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
						sensitif bagi lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	
DT.03.03		d. Pelayanan Hukum	Biasa/Terbuka	Seluruh Pengguna Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Direktorat Pertimbangan Hukum - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
PM	V	PIDANA MILITER					
PM.00	1.	Perumusan Kebijakan Bidang Penegakan Hukum Tindak Pidana Militer					
		Perumusan kebijakan terkait Bidang Pidana Militer - Penyiapan bahan - Telaah - Pemberian masukan dan pemberian dukungan - Pengumpulan dan pengelolaan data - Laporan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PM.01	2.	Penindakan Pidana Militer					
PM.01.00		a. Laporan dan Pengaduan Masyarakat Pidana Militer	Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Madya - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro - Informasi yang terdapat dalam arsip bersifat sensitif bagi lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak 	<ul style="list-style-type: none"> - Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer - Kejaksaan Tinggi

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
						kemitraan dan reputasi	
PM.01.01		b. Hasil Analisis Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait Pidana Militer	Sangat Rahasia	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Apabila informasi diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa	Direktorat Penyidikan
PM.01.02		c. Penyidikan Perkara Koneksitas	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer - Kejaksaan Tinggi
PM.01.03		d. Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Korupsi, Perkara Pencucian Uang dan Perkara Lainnya di Bidang Pidana Militer	Rahasia	- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	- Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan	Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
						negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro - Informasi yang terdapat dalam arsip bersifat sensitif bagi lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PM.01.04		e. Koordinasi Perkara Koneksitas	Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Madya - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro - Informasi yang terdapat dalam arsip bersifat sensitif bagi lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi 	Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3		4	5	6	7	8
PM.01.05		f.	Koordinasi Perkara Korupsi, Pencucian Uang dan Perkara Lainnya di Bidang Pidana Militer	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer - Kejaksaan Tinggi
PM.02	3.	Penuntutan						
PM.02.00		a.	Prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, dan penghentian penuntutan,	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer - Kejaksaan Tinggi
PM.02.01		b.	Praperadilan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer - Kejaksaan Tinggi
PM.02.02		c.	Penuntutan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer - Kejaksaan Tinggi

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PM.02.03		d. Perlawanan, Upaya Hukum Biasa, dan Pelaksanaan Penetapan Hakim	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer - Kejaksaan Tinggi
PM.02.04		e. Koordinasi Teknis Penuntutan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer - Kejaksaan Tinggi
PM.03	4.	Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi					
PM.03.00		a. Pelaksanaan Putusan Pengadilan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer - Kejaksaan Tinggi
PM.03.01		b. Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Penyelesaian Barang Rampasan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer - Kejaksaan Tinggi

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PM.03.02		c. Pengawasan terhadap Putusan Pidana Bersyarat, Putusan Pidana Pengawasan, Keputusan Lepas Bersyarat,	Rahasia	- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	- Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro - Informasi yang terdapat dalam arsip bersifat sensitif bagi lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PM.03.03		d. Permohonan Grasi, Amnesti, dan Abolisi, dan Upaya Hukum Luar Biasa,	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer - Kejaksaan Tinggi
PM.03.04		e. Eksaminasi Perkara Koneksitas dan Perkara Tindak Pidana yang Penuntutannya Dilakukan oleh Oditurat	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer
PM.03.05		f. Pengelolaan Barang Bukti	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer - Kejaksaan Tinggi
PM.04	5.	Pengamanan dan Pengawasan Penanganan Perkara					
PM.04.00		a. Koordinasi dan Kerja Sama	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer - Kejaksaan Tinggi

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PM.04.01		b. Pengamanan dan Pengawasan Tahanan dan Terpidana	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator (Kepala Kejaksaan Negeri) - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer - Kejaksaan Tinggi
PA	VI	PEMULIHAN ASET					
PA.00	1.	Penelusuran Aset					
PA.00.00		a. Penelusuran Aset Nasional	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Pusat Pemulihan Aset
PA.00.01		b. Penelusuran Aset Transnasional	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Pusat Pemulihan Aset

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PA.01	2.	Perampasan Aset					
PA.01.00		a. Perampasan Aset Nasional	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Pusat Pemulihan Aset
PA.01.01		b. Perampasan Aset Transnasional	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Pusat Pemulihan Aset
PA.02	3.	Pengamanan Aset					
PA.02.00		a. Pengamanan Aset Nasional	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Pusat Pemulihan Aset
PA.02.01		b. Pengamanan Aset Transnasional	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Pusat Pemulihan Aset

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PA.03	4.	Pemeliharaan Aset					
PA.03.00		a. Pemeliharaan Aset Nasional	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Pusat Pemulihan Aset
PA.03.01		b. Pemeliharaan Aset Transnasional	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Pusat Pemulihan Aset
PA.04	5.	Pengembalian Aset					
PA.04.00		a. Lelang	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Pusat Pemulihan Aset
PA.04.01		b. Hibah	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Pusat Pemulihan Aset

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PA.04.02		c. Penetapan Status Penggunaan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Pusat Pemulihan Aset
PS	VII.	PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM					
PS.00		Analisis Strategi Kebijakan Politik Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia					
PS.00.00		Penerbitan Rekomendasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Politik Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Satuan Kerja - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum
PS.00.01		Penilaian Karya Tulis Ilmiah (Makalah)	Biasa/Terbuka	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Satuan Kerja - Pengawas Internal	- Akademisi - Komunitas Ilmiah	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum
PS.00.02		Seminar Ilmiah	Biasa/Terbuka	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Satuan Kerja - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PS.01		Open Journal System (OJS)/Jurnal Bina Adhyaksa	Biasa/Terbuka	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Kepala Satuan Kerja - Pengawas Internal	- Akademisi - Komunitas Ilmiah	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum
PS.02		Analisis Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Intelijen, Pidana, dan Perdata dan Tata Usaha Negara					
PS.02.00		Penerbitan Rekomendasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Intelijen, Pidana, dan Perdata dan Tata Usaha Negara	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Kepala Satuan Kerja - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum
PS.02.01		<i>Policy Brief dan Policy Paper</i>	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Kepala Satuan Kerja - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum
PS.02.02		Pengelolaan e-analisis	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Kepala Satuan Kerja - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PR	I	PERENCANAAN					
PR.00	1	Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan					
PR.00.00		a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)/ <i>Master Plan</i>	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perencanaan
PR.00.01		b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perencanaan
PR.00.02		c. Rencana Strategis (Renstra)	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perencanaan
PR.00.03		d. Musyawarah Pembangunan Perencanaan Nasional (Musrenbang)	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perencanaan

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PR.01	2.	Rencana Kerja					
PR.01.00		a. Usulan Kegiatan Unit Kerja beserta data pendukung	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perencanaan
PR.01.01		b. Rencana Kerja Tahunan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perencanaan
PR.01.02		c. Rencana Kerja Berdasar Pagu Indikatif	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perencanaan
PR.01.03		d. Inisiatif Baru	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perencanaan
PR.02	3.	Penetapan/Kontrak/Perjanjian Kinerja					
PR.02.00		a. Jaksa Agung	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Perencanaan

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PR.02.01		b. Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Perencanaan
PR.02.02		c. Eselon III/Eselon IV/ Staf/Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perencanaan
PR.03	4.	Perencanaan Anggaran					
PR.03.00		a. Penyusunan Rencana Anggaran (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL)/ Kerangka Acuan Kerja (KAK))	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perencanaan
PR.03.01		b. Perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perencanaan
PR.03.02		c. Penetapan Anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Murni dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Awal	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perencanaan

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PR.04	5.	Revisi Anggaran					
PR.04.00		a. Revisi DIPA dan POK	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perencanaan
PR.04.01		b. Anggaran Biaya Tambahan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perencanaan
PR.04.02		c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi, - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perencanaan
PR. 05	6.	Laporan					
PR.05.00		a. Laporan Berkala (Bulanan, Triwulan dan Semester)	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Perencanaan
PR.05.01		b. Laporan Tahunan Unit Kerja	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perencanaan

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PR.05.02		c. Laporan Tahunan Lembaga	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksanaan	Biro Perencanaan
PR.05.03		d. Laporan Khusus	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik, - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksanaan	Biro Perencanaan
PR.05.04		e. Laporan Perkembangan Tahapan Kegiatan/ <i>Progress Report</i>	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik, - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksanaan	Biro Perencanaan
PR.05.05		f. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN)/Laporan Kinerja (LKJ)	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksanaan	Biro Perencanaan
PR.06	7	Evaluasi Program					
PR.06.00		a. Evaluasi Program Unit Kerja	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksanaan	Biro Perencanaan

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PR.06.01		b Evaluasi Program Lembaga	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Perencanaan
KE	II	KERJA SAMA					
KE.00	1.	Kerja Sama Dalam Negeri					
		Perjanjian Kerja Sama/ <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri - Telaah/kajian/evaluasi dan pertimbangan hukum - Risalah pembuatan MoU/kontrak/perjanjian kerja sama dalam negeri - Rancangan/draf awal - Rancangan/draf akhir - Memori perjanjian - Naskah asli yang ditandatangani	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
KE.01	2.	Kerja Sama Internasional					
		Perjanjian Kerja Sama Internasional - Telaah/kajian/evaluasi dan pertimbangan hukum	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional, - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> - Risalah pembuatan MoU/kontrak/perjanjian kerja sama internasional - Rancangan/draf awal - Rancangan/draf akhir - Memori perjanjian - Naskah asli yang ditandatangani 					
HK	III	HUKUM					
HK.00	1.	Program Legislasi					
HK.00.01		a. Bahan/Materi Program Legislasi Nasional	Biasa/Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Publik Eksternal - Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
HK.00.02		b. Program Legislasi Instansi <ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi peraturan instansi - Undangan - Daftar hadir - Laporan 	Biasa/Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Publik Eksternal - Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
HK.01	2.	Produk Hukum					
HK.01.00		a. Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan - Instruksi - Surat Edaran 	Biasa/Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Publik Eksternal - Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
HK.01.01		b. Produk Hukum yang Bersifat Penetapan - Keputusan - Keputusan Eselon I - Surat Perintah	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
HK.02	3.	Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan (NSPK) - Naskah Akademik - Penyusunan draf awal - Penyusunan draf akhir - Penetapan Pedoman/standar/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dan prosedur tetap	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
HK.03	4.	Dokumentasi dan Informasi Hukum - Undang-Undang - Peraturan Pemerintah - Peraturan Presiden - Keputusan Presiden - Peraturan-peraturan lain yang dijadikan referensi	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
HK.04	5.	Sosialisasi, Penyebarluasan Informasi dan Pembinaan Hukum					
HK.04.00		a. Sosialisasi/Diseminasi Hukum	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
HK.04.01		b. Penyebarluasan Produk dan Informasi Hukum	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik, - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
HK.04.02		c. Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri - Pusat Penerangan Hukum
HK.05	6.	Pertimbangan/Telaah Hukum/ Judicial Review Peraturan Perundang-undangan - Permintaan pertimbangan/telaah - Hasil pertimbangan/telaah	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
HK.06	7.	Terjemahan Peraturan Perundang-undangan - Bahan terjemahan - Undangan - Daftar hadir - Hasil terjemahan yang sudah ditandatangani oleh kementerian yang membidangi peraturan perundang-undangan - Hasil terjemahan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
HK.07	8.	Ekstradisi, Bantuan Hukum Timbal Balik dan Pemindahan Narapidana antar Negara - Berkas perkara - Surat pertimbangan presiden - Putusan pengadilan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
HM	IV	HUBUNGAN MASYARAKAT					
HM.00	1.	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi Kelembagaan					
HM.00.00		a. Brosur/Leaflet/Poster	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Pusat Penerangan Hukum - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri
HM.00.01		b. Pengumuman	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Pusat Penerangan Hukum - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri
HM.00.02		c. Pemberitaan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Pusat Penerangan Hukum - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
HM.00.03		d. Kliping koran	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Pusat Penerangan Hukum - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri
HM.01	2.	Hubungan Antar Lembaga					
HM.01.00		a. Hubungan Pemerintahan (Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif)	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Pusat Penerangan Hukum - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri
HM.01.01		b. Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Pusat Penerangan Hukum - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri
HM.01.02		c. Hubungan dengan Forum Kehumasan/Badan Koordinasi Kehumasan/Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Pusat Penerangan Hukum - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri
HM.01.03		d. Hubungan dengan Media Massa - Kunjungan wartawan/peliputan - <i>Media visit</i> - Wawancara	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Pusat Penerangan Hukum - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
HM.01.04		e. Siaran Pers/Konferensi Pers/ <i>Press Release</i>	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Pusat Penerangan Hukum - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri
HM.01.05		f. Penerimaan Laporan Pengaduan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Pusat Penerangan Hukum - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri
HM.01.06		g. Survei Kepuasan Masyarakat	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Pusat Penerangan Hukum - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri
HM.02	3.	Hearing/Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) - Surat undangan dari DPR - Bahan/materi RDP - Laporan/hasil RDP	Rahasia	- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	- Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Pusat Penerangan Hukum

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
						- Informasi yang terdapat dalam arsip bersifat sensitif bagi lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	
HM.03	4.	Bahan/Materi Pidato/Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Kabinet	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Pusat Penerangan Hukum
HM.04	5.	Dokumentasi Hasil Liputan Kegiatan Pimpinan atau Acara Kelembagaan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Pusat Penerangan Hukum

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
HM.05	6.	Penerbitan Majalah, Buletin, Koran, dan Jurnal	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Pusat Penerangan Hukum
HM.06	7.	Publikasi melalui Media Cetak Maupun Elektronik	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Pusat Penerangan Hukum
HM.07	8.	Pameran, Sayembara, dan Festival	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Pusat Penerangan Hukum - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri
HM.08	9.	Penghargaan dan Tanda Kenang-kenangan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Pusat Penerangan Hukum - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri
HM.09	10.	Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, dan Permohonan Maaf	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik, Pengawas Eksternal Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Pusat Penerangan Hukum

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
HM.10	11	Layanan Informasi Publik (LIP)/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) - Prosedur layanan informasi publik - Laporan layanan informasi publik - Aspirasi publik	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Pusat Penerangan Hukum
OT	V	ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN					
OT.00	1.	Organisasi					
OT.00.00		a. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi - Analisis organisasi - Pembentukan - Perubahan - Pembubaran	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perencanaan
OT.00.01		b. Evaluasi Organisasi	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perencanaan
OT.01	2.	Tata Laksana					
OT.01.00		a. Sistem dan Prosedur Kerja Standar Operasional Prosedur/ Operasional Prosedur/Prosedur Tetap	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perencanaan

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
OT.01.01		b. Kajian/Analisis Jabatan/Analisis Manajemen serta Penyuluhan Ketatalaksanaan - Analisis organisasi - Uraian jabatan - Analisis beban kerja - Kelas jabatan - Peta jabatan - Evaluasi jabatan - Penyuluhan ketatalaksanaan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perencanaan
OT.01.02		c. Standar Kompetensi Jabatan - Struktural - Fungsional	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik, - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Kepegawaian
OT.02	3.	Reformasi Birokrasi					
OT.02.00		a. Implementasi Reformasi Birokrasi	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perencanaan
OT.02.01		b. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perencanaan

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
OT.02.02		c. Penilaian Reformasi Birokrasi	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perencanaan
KP	VI	KEPEGAWAIAN					
KP.00	1.	Formasi Pegawai					
KP.00.00		a. Usulan dari Unit Kerja - Analisis jabatan - Analisis beban kerja	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat
KP.00.01		b. Usulan permintaan formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) - Surat permintaan persetujuan formasi dari Kemenpan dan RB	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Kepegawaian
KP.00.02		c. Persetujuan formasi dari Kemenpan dan RB - Surat persetujuan formasi dari Kemenpan dan RB	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Kepegawaian

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KP.00.03		d. Penetapan Formasi - Usulan dan keputusan penetapan formasi	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Kepegawaian
KP.00.04		e. Penetapan Formasi Khusus - Usulan dan keputusan penetapan formasi khusus	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Kepegawaian
KP.01	2.	Pengadaan Aparatus Sipil Negara (ASN) dan/atau Pegawai Negeri Sipil (PNS)					
KP.01.00		a. Proses Penerimaan ASN dan/atau PNS - Pengumuman melalui media cetak maupun elektronik - Seleksi administrasi - Pemanggilan peserta tes - Pelaksanaan ujian tertulis - Pelaksanaan ujian kesehatan - Keputusan hasil ujian - Wawancara - Keputusan kelulusan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Kepegawaian
KP.01.01		b. Sanggahan Proses Seleksi, Pengumuman Kelulusan, Kelengkapan Berkas	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KP.01.02		c. Penetapan Pengumuman Kelulusan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian
KP.01.03		d. Berkas lamaran yang tidak diterima	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian
KP.01.04		e. Nota usul dan kelengkapan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) - Surat lamaran - Ijazah - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) - Kartu kuning - Surat keterangan dokter - Surat keterangan lain yang disesuaikan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KP.01.05		f. Nota usul dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS lebih 2 tahun	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat
KP.01.06		g. Keputusan CPNS/PNS Kolektif	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat
KP.02	3.	Pengadaan ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN P3K)/Pegawai Kontrak					
KP.02.00		a. Proses Penerimaan ASN P3K - Pengumuman penerimaan ASN P3K - Seleksi administrasi - Pemanngilan peserta tes - Pelaksanaan ujian tertulis - Pelaksanaan ujian kesehatan - Kemampuan bidang - Keputusan hasil ujian - Wawancara	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Kepegawaian

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KP.02.01		b. Penetapan Pengumuman Kelulusan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian
KP.02.02		c. Pengangkatan ASN P3K - Surat lamaran - Ijazah - SKCK - Kartu kuning - Surat keterangan dokter - Surat keterangan lain yang disesuaikan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian
KP.02.03		d. Berkas Lamaran yang Tidak Diterima	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian
KP.02.04		e. Keputusan/Perjanjian Kerja	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KP.03	4.	Pengadaan Pegawai Non ASN/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) - Berkas lamaran - Keputusan penetapan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksanaan	Biro Kepegawaian
KP.04	5.	Pengadaan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama					
KP.04.00		a. Proses Penerimaan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama - Pengumuman - Seleksi administrasi - Pemanggilan peserta tes - Pelaksanaan ujian tertulis - <i>Assessment Center</i> - Kompetensi bidang - Keputusan hasil ujian dan wawancara	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi	Biro Kepegawaian
KP.04.01		b. Penetapan Pengumuman Kelulusan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksanaan	Biro Kepegawaian
KP.04.02		c. Berkas Lamaran yang Tidak Diterima	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksanaan	Biro Kepegawaian

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KP.04.03		d. Usul Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Kepegawaian
KP.04.04		e. Nota Usul ke Presiden	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Kepegawaian
KP.05	6.	Pembinaan/Pengembangan Karier Pegawai					
KP.05.00		a. Izin Belajar/Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat)/Kursus/Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat - Surat edaran/pengumuman berkenaan dengan studi lanjut - Surat menyurat permohonan dari pegawai dan atau usulan studi - Laporan hasil tes masuk yang dituju - Ikatan kerja dan surat perjanjian izin/tugas belajar - Surat perintah/tugas belajar/keputusan/surat izin - Laporan perkembangan studi - Ijazah - Akreditasi program studi - Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/ sertifikat	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KP.05.01		b. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian
KP.05.02		c. Pakta Integritas/Kesetiaan pada Ideologi Pancasila	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian
KP.05.03		d. Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional - Daftar usulan PAK - PAK	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian
KP.05.04		e. Disiplin Pegawai - Daftar hadir - Rekapitulasi kehadiran - Izin pegawai	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KP.05.05		f. Pelaksanaan Keputusan Hukuman Disiplin	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat - Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
KP.05.06		g. Majelis Kehormatan Jaksa	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat - Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
KP.05.07		h. <i>Clearence</i> /Surat Keterangan Kepegawaian	Biasa Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik, - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat - Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan - Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
KP.05.08		i. Penghargaan dan Tanda Jasa/ Satya Lencana Karya Satya (10, 20 dan 30) - Administrasi - Keputusan penetapan - Sertifikat/piagam	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KP.06	7.	Mutasi Pegawai					
KP.06.00		a. Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Pindah Sementara, Mutasi antar Unit, dan Penugasan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang Dikaryakan <ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan - Surat alih tugas/perpindahan - Surat Keputusan - Surat tugas - Nota persetujuan/pertimbangan KASN 	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat
KP.06.01		b. Mutasi Keluarga <ul style="list-style-type: none"> - Surat izin pernikahan/perceraian - Surat penolakan izin - Surat nikah/cerai - Akte kelahiran anak - Surat keterangan adopsi anak - Surat keterangan meninggal dunia 	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat
KP.06.02		c. Kenaikan Pangkat/Golongan <ul style="list-style-type: none"> - Nota usul kenaikan pangkat/golongan - Sertifikat lulus uji kompetensi - Nota persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) - Keputusan kenaikan pangkat/golongan 	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum - 	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KP.06.03		d. Kenaikan Gaji Berkala - Usulan kenaikan gaji berkala - Keputusan kenaikan gaji berkala	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat
KP.06.04		e. Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan - Usulan dan keputusan kenaikan jabatan - Usulan dan keputusan pengangkatan jabatan - Usulan dan keputusan pemberhentian jabatan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat
KP.06.05		f. Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai yang Melakukan Tindak Pidana - Usulan - Nota persetujuan - Keputusan - Surat persetujuan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat
KP.06.06		g. Peninjauan Masa Kerja - Usulan peninjauan setelah Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) - Usulan - Nota persetujuan - Keputusan - Surat persetujuan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KP.06.07		h. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT)/Tim Penilai Kinerja - Administrasi - Notula	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat
KP.07	8.	Administrasi Pegawai					
KP.07.00		a. Cuti Besar - Surat permohonan cuti - Surat cuti	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat
KP.07.01		b. Cuti Sakit, Cuti Bersalin, dan Cuti Tahunan - Surat permohonan cuti - Surat cuti	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat
KP.07.02		c. Cuti Alasan Penting - Surat permohonan cuti - Surat cuti	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KP.07.03		d. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) - Surat permohonan cuti - Surat cuti	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat
KP.07.04		e. Dokumentasi Identitas Pegawai - Usul penetapan kartu pegawai (KARPEG)/kartu pegawai negeri sipil elektronik (KPE)/kartu istri (KARIS)/kartu suami (KARSU) - Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) - Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan - Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P)/ Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) - Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4)	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat
KP.07.05		f. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KP.08	9.	Kesejahteraan Pegawai					
KP.08.00		a. Pemeliharaan Kesehatan Pegawai - Usulan pemeriksaan kesehatan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat
KP.08.01		b. Asuransi Pegawai/Asuransi Kesehatan (ASKES)/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) - Administrasi pendaftaran - Penawaran asuransi	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum dan semua fungsi sekretariat
KP.08.02		c. Bantuan Sosial - Tanda terima - Ucapan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat
KP.08.03		d. Rekreasi, Olah Raga, dan Kesenian - Penetapan anggaran - Administrasi - Laporan pertanggungjawaban	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Umum

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KP.08.04		e. Organisasi Non Kedinasan Pegawai - Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) - Persatuan Jaksa Indonesia - Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Kejaksaan - Yayasan Tridaya - Keluarga Besar Purna Adhyaksa - <i>International Association of Prosecutors</i> - Organisasi non kedinasan lainnya	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja instansi	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat
KP.09	10.	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian - Pengaduan - Laporan - Notula - Berita acara pemeriksaan - Keputusan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat
KP.10	11.	Pemberhentian Pegawai - Usulan pemberhentian pegawai - Penetapan pemberhentian pegawai	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KP.11	12.	<p>Pemberhentian Karena Pensiun Pegawai/Janda/Duda dan PNS Yang Tewas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usulan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda dan PNS yang tewas - Keputusan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda dan PNS yang tewas - Penetapan pensiun pegawai/janda/duda dan PNS yang tewas. 	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat
KP.12	13.	<p>Berkas Perseorangan Pegawai ASN PNS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkas lamaran yang diterima - Nota penetapan NIP dan kelengkapannya - Nota persetujuan/pertimbangan Kepala BKN - Keputusan penangkatan CPNS - Hasil pengujian kesehatan - Keputusan pengangkatan PNS/ASN - Keputusan peninjauan masa kerja - Keputusan kenaikan pangkat - Surat pernyataan melaksanakan tugas/menduduki jabatan - Surat pernyataan pelantikan - Keputusan pengangkatan dalam jabatan atau pemberhentian dari jabatan struktural/fungsional - Keputusan perpindahan wilayah kerja - Keputusan perpindahan antar instansi - Keputusan CLTN 	Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Madya - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro - Informasi yang terdapat dalam arsip bersifat sensitif bagi lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap 	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> - Berita acara pemeriksaan - Keputusan hukuman jabatan/hukuman disiplin PNS/ASN - Keputusan perbantukan/dipekerjakan di luar instansi induk - Keputusan penarikan kembali dari diperbantukan/dipekerjakan - Keputusan pemberian uang tunggu - Keputusan pembebasan dari jabatan organik karena diangkat sebagai pejabat negara - Keputusan pengalihan PNS - Keputusan pemberhentian sebagai PNS/ASN - Keputusan pemberhentian sementara - Surat keterangan pernyataan hilang - Surat keterangan kembalinya PNS/ASN yang dinyatakan hilang - Keputusan penggantian nama - Surat perbaikan tanggal tahun kelahiran - Surat nikah/cerai - Akta kelahiran - Isian formulir Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) - Berita acara pengambilan sumpah/janji PNS dan jabatan - Surat permohonan menjadi anggota partai politik - Surat keterangan mutasi keluarga - Surat keterangan meninggal dunia - Surat keterangan peningkatan pendidikan 				privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan angka kredit jabatan fungsional - Surat keterangan hasil penelitian khusus - Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala - Surat tugas/izin belajar dalam/luar negeri - Surat izin bepergian ke luar negeri - Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS - Ijazah/sertifikat - Keputusan penempatan/penarikan pegawai - Keputusan pengangkatan pada jabatan di luar instansi induk - Surat pertimbangan status PNS - Keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS - Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan organis karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah - Keputusan pensiun 					
KP.13	14.	Berkas Perseorangan Pejabat Eselon I	Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Madya - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban 	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
						umum, termasuk dampak ekonomi makro - Informasi yang terdapat dalam arsip bersifat sensitif bagi lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	
KP.14	15.	Berkas Perseorangan Pegawai P3K/ Non ASN - Surat lamaran - Ijazah dan SKCK - Surat keterangan dokter - Keputusan pengangkatan	Rahasia	- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	- Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
						- Informasi yang terdapat dalam arsip bersifat sensitif bagi lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	
KP.15	16.	Berkas Perseorangan Pegawai TNI yang Dikaryakan <ul style="list-style-type: none"> - Surat lamaran - Ijazah dan SKCK - Surat keterangan dokter - Keputusan pengangkatan 	Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Madya - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro - Informasi yang terdapat dalam arsip bersifat sensitif bagi 	Biro Kepegawaian dan semua fungsi sekretariat

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
						lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	
DL	VII	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
DL.00	1.	Perencanaan Diklat					
DL.00.00		a. Analisis Kebutuhan Diklat - Usulan kebutuhan diklat - Perencanaan anggaran diklat - Kebutuhan tenaga pengajar/ widyaiswara - Sasaran/target peserta - Sistem/metode diklat - Laporan analisis kebutuhan diklat	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksanaan	Badan Pendidikan dan Pelatihan
DL.00.01		b. Program Kediklatan Tahunan - Kalender diklat	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksanaan	Badan Pendidikan dan Pelatihan

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
DL.00.02		c. Kurikulum dan Silabus Diklat - Keputusan tim penyusunan kurikulum/silabus - Notula rapat tim penyusun kurikulum - Rancangan kurikulum - Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) - Panduan pengajaran - Penetapan kurikulum - Evaluasi kurikulum/silabus - Laporan hasil evaluasi kurikulum/silabus	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Badan Pendidikan dan Pelatihan
DL.00.03		d. Modul/Materi/Bahan Ajar - Keputusan tim penyusunan modul/materi/bahan ajar - Notula rapat tim penyusun modul/materi/bahan ajar - Rancangan modul/materi/bahan ajar - Penetapan modul/materi bahan ajar - Evaluasi modul/materi/bahan ajar - Laporan hasil evaluasi modul/materi/bahan ajar	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Badan Pendidikan dan Pelatihan
DL.00.04		e. Koordinasi Penyelenggaraan Diklat - Surat permohonan koordinasi - Surat jawaban permohonan koordinasi - Laporan hasil koordinasi	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Badan Pendidikan dan Pelatihan

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
DL.01	2.	Penyelenggaraan Diklat					
DL.01.00		a. Diklat Manajemen dan Kepemimpinan - Surat pemanggilan peserta - Keputusan tim penyelenggara - Keputusan tim pengajar - Panduan diklat - Sambutan pembukaan penyelenggara diklat - Daftar hadir peserta diklat - Daftar hadir widyaiswara - <i>Pretest/Posttest</i> - Hasil nilai peserta diklat - Sambutan penutup - Laporan/tugas akhir diklat	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Badan Pendidikan dan Pelatihan
DL.01.01		b. Diklat Fungsional - Surat pemanggilan peserta - Keputusan tim penyelenggara - Keputusan tim pengajar - Panduan diklat - Sambutan pembukaan penyelenggara diklat - Daftar hadir peserta diklat - Daftar hadir widyaiswara - <i>Pretest/Posttest</i> - Hasil nilai peserta diklat - Sambutan penutup - Laporan/tugas akhir diklat	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Badan Pendidikan dan Pelatihan

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
DL.01.02		c. Diklat Teknis <ul style="list-style-type: none"> - Surat pemanggilan peserta - Keputusan tim Penyelenggara - Keputusan tim pengajar - Panduan diklat - Sambutan pembukaan penyelenggara diklat - Daftar hadir peserta diklat - Daftar hadir widyaiswara - <i>Pretest/Posttest</i> - Hasil nilai peserta diklat - Sambutan penutup - Laporan/tugas akhir diklat 	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Badan Pendidikan dan Pelatihan
DL.01.03		d. Diklat Kerja Sama <ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan kerja sama - Perjanjian kerja sama - Penugasan narasumber/widyaiswara - Jadwal - Keputusan tim pelaksana - <i>Pretest/Posttest</i> - Hasil nilai peserta diklat 	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi, - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Badan Pendidikan dan Pelatihan
DL.02	3.	Evaluasi Diklat					
DL.02.00		a. Evaluasi Penyelenggara Diklat <ul style="list-style-type: none"> - Isian formulir evaluasi penyelenggara - Laporan evaluasi penyelenggaraan diklat 	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Badan Pendidikan dan Pelatihan

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
DL.02.01		b. Evaluasi Widyaiswara - Isian formulir evaluasi widyaiswara - Laporan evaluasi widyaiswara	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Badan Pendidikan dan Pelatihan
DL.02.02		c. Evaluasi Peserta/Alumni Diklat - Isian formulir evaluasi alumni peserta pasca diklat - Laporan evaluasi alumni peserta pasca diklat	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Badan Pendidikan dan Pelatihan
DL.03	4.	Akreditasi Lembaga Diklat - Surat permohonan akreditasi - Berita acara rapat tim penilai - Keputusan penetapan akreditasi - Sertifikat akreditasi - Laporan akreditasi lembaga diklat	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Badan Pendidikan dan Pelatihan
DL.04	5.	Data Penyelenggaraan Diklat					
DL.04.00		a. Data Lembaga Penyelenggara Kerja Sama Diklat	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Badan Pendidikan dan Pelatihan
DL.04.01		b. Data Prasarana Diklat	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Badan Pendidikan dan Pelatihan

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
DL.04.02		c. Data Sarana Diklat	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Badan Pendidikan dan Pelatihan
DL.04.03		d. Data Pengelola Diklat	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Badan Pendidikan dan Pelatihan
DL.04.04		e. Data Penyelenggaraan Diklat	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Badan Pendidikan dan Pelatihan
DL.04.05		f. Data Widyaiswara	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Badan Pendidikan dan Pelatihan
DL.04.06		g. Data Program Diklat	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Badan Pendidikan dan Pelatihan
DL.04.07		h. Data Peserta Diklat - Surat permohonan nomor register - Buku register - Surat penyampaian kode register	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Badan Pendidikan dan Pelatihan

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
DL.04.08		i. Salinan STTPL/Sertifikat Kelulusan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksanaan	Badan Pendidikan dan Pelatihan
DL.05	6.	Pendidikan Formal S2/S3 - MoU dengan universitas - Pengumuman - Seleksi - Penetapan kelulusan penerima beasiswa - Salinan ijazah - Laporan kegiatan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksanaan	Badan Pendidikan dan Pelatihan
KU	VIII	KEUANGAN					
KU.00	1.	Pelaksanaan Anggaran					
KU.00.00		a. Rencana Anggaran Biaya	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksanaan	Biro Keuangan dan semua fungsi sekretariat
KU.00.01		b. Belanja Pegawai	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksanaan	Biro Keuangan dan semua fungsi sekretariat

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KU.00.02		c. Pengeluaran Belanja Barang	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Keuangan dan semua fungsi sekretariat
KU.00.03		d. Belanja Barang Inventaris/Barang Modal	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Keuangan dan semua fungsi sekretariat
KU.01	2.	Pengelolaan Perbendaharaan					
KU.01.00		a. Perbendaharaan - Keputusan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Keputusan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Keputusan pengangkatan pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) - Keputusan pengangkatan bendahara penerima dan bendahara pengeluaran	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Keuangan dan semua fungsi sekretariat
KU.01.01		b. Pajak - Surat Setor Pajak (SSP) - Nota Konfirmasi - Surat keterangan pajak lainnya	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Keuangan dan semua fungsi sekretariat

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KU.02.02		c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Keuangan dan semua fungsi sekretariat
KU.01.03		d. Pengembalian Belanja - Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) - Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Keuangan dan semua fungsi sekretariat
KU.01.04		e. Pembukuan Anggaran - Buku Kas Umum (BKU) - Buku Kas Pembantu (BKP) - Kartu Realisasi Anggaran - Kartu Pengawasan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Keuangan dan semua fungsi sekretariat
KU.02	3.	Verifikasi Anggaran	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Keuangan dan semua fungsi sekretariat
KU.03	4.	Akuntansi dan Pelaporan					
KU.03.00		a. Dokumen Akuntansi Keuangan - Berita acara pemeriksaan kas - Kas/register penutupan kas	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Keuangan dan semua fungsi sekretariat

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KU.03.01		b. Laporan Keuangan Tahunan - Laporan arus kas - Laporan realisasi anggaran - Neraca - Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi	Biro Keuangan dan semua fungsi sekretariat
KU.04	5.	Ketatausahaan Keuangan					
KU.04.00		a. Keterangan Penghasilan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Keuangan dan semua fungsi sekretariat
KU.04.01		b. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Keuangan dan semua fungsi sekretariat
KU.04.02		c. Pinjaman	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Keuangan dan semua fungsi sekretariat
KU.04.03		d. Tabungan Perumahan (TAPERUM)	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di	Biro Keuangan dan semua fungsi sekretariat

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
						lingkungan Kejaksaan	
KU.04.04		e. Iuran Keanggotaan Organisasi	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Keuangan dan semua fungsi sekretariat
KU.05	6.	Bantuan/Hibah/Pinjaman Luar Negeri - Permohonan pinjaman luar negeri (<i>blue book</i>) - Dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (<i>grey book</i>) - Dokumen MoU dan dokumen sejenisnya - Alokasi dan relokasi penggunaan dana pinjaman/hibah luar negeri	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Keuangan dan semua fungsi sekretariat
KU.06	7.	Sistem Akuntansi Instansi (SAI)					
KU.06.00		a. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Keuangan dan semua fungsi sekretariat
KU.06.01		b. Register Transaksi Harian (RTH)	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Keuangan dan semua fungsi sekretariat

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KU.06.02		c. Laporan Realisasi SAI Bulanan/Triwulan/Semester	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Keuangan dan semua fungsi sekretariat
KU.07	8.	Pertanggungjawaban Keuangan Negara					
KU.07.00		a. Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara - Tuntutan Perbendaharaan (TP) - Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Keuangan
PL	IX	PERLENGKAPAN					
PL.00	1.	Rencana Pengadaan (Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konstruksi) - Hasil identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa - Kerangka Acuan Kerja (KAK) - Surat penetapan rencana anggaran Pengadaan - Pengumuman rencana umum pengadaan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perlengkapan

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PL.01	2.	Pemilihan Penyedia					
PL.01.00		a. Persiapan Pemilihan Penyedia - Hasil identifikasi/ pemeriksaan data pengadaan barang/jasa - Penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis - Penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) - Penyusunan dokumen pengadaan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksanaan	Biro Perlengkapan
PL.01.01		b. Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pengadaan Langsung - Berkas pengajuan dari unit kerja pengusul ke PPK, meliputi nota dinas, spesifikasi teknis, RAB, POK, surat pesanan, surat jalan, faktur/ <i>invoice</i> , undangan pengadaan langsung, Berita Acara Evaluasi Penawaran, Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung, Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Serah Terima (BAST), Berita Acara Pembayaran (BAP), resume kontrak, kuitansi, surat setoran pajak, e-faktur.	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksanaan	Biro Perlengkapan
PL.01.02		c. <i>e-Purchasing</i> dan <i>e-catalog</i> - Berkas pengajuan dari unit pengusul ke PPK, meliputi, nota dinas, spesifikasi teknis, RAB, POK, surat pesanan, surat jalan, faktur/ <i>invoice</i> , undangan pengadaan langsung, Berita Acara Evaluasi Penawaran, Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung, SPK, BAST, BAP,	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksanaan	Biro Perlengkapan

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Resume kontrak, kuitansi, surat setoran pajak, e-faktur.					
PL.01.03		d. Pelaksanaan Kontrak Tender/ Penunjukan Langsung <ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman - Pendaftaran - Notula penjelasan pekerjaan - Pemasukan dan pembukaan penawaran meliputi; profil perusahaan, akte pendirian perusahaan, pengalaman kerja perusahaan, SIUP/NIB (Nomor Induk Berusaha), TDP, rekening koran, NPWP dll. - Evaluasi penawaran - Penetapan dan pengumuman pemenang - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) - Kontrak perjanjian/pekerjaan - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) - Dokumen hasil pelaksanaan kontrak - Laporan pelaksanaan kontrak/pekerjaan - Berita Acara Pemeriksaan - Adendum kontrak - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 	Biasa/Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perlengkapan

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PL.01.04		e. Swakelola - Pengumuman - Hasil proses seleksi - Kontrak - Surat tugas - Perjanjian Kerja Sama/MOU - Laporan pelaksanaan swakelola - Laporan evaluasi	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perlengkapan
PL.02	3.	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)					
PL.02.00		a. Penatausahaan BMN - Laporan pencatatan BMN - Pencatatan barang masuk - Daftar BMN - Pembukuan BMN	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perlengkapan
PL.02.01		b. Inventarisasi BMN - <i>Stock opname</i> - Daftar inventaris barang	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perlengkapan
PL.02.02		c. Pendistribusian BMN - Catatan/bukti barang masuk/keluar - Catatan/bukti pendistribusian barang	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perlengkapan
PL.02.03		d. Penetapan Status Penggunaan BMN - Usulan penggunaan BMN - Keputusan penetapan status penggunaan barang	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perlengkapan

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PL.02.04		e. Pemeliharaan BMN - Usulan pemeliharaan - Laporan pemeliharaan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perlengkapan
PL.02.05		f. Pemanfaatan BMN - Permintaan/usulan pemanfaatan barang/BMN - Perjanjian pemanfaatan BMN - Penolakan pemanfaatan BMN - Laporan pemanfaatan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perlengkapan
PL.02.06		g. Pemindahtanganan BMN - Usulan pemindahtanganan barang/BMN - Penawaran hibah BMN - Berita acara pemindahtanganan BMN	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perlengkapan
PL.02.07		h. Penghapusan BMN - Daftar inventaris barang rusak - Usulan daftar BMN yang akan dihapus - Daftar BMN yang dinilai kembali - Keputusan tim penghapusan BMN - Keputusan persetujuan penghapusan - berita acara penghapusan BMN - Lelang BMN - Laporan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perlengkapan

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PL.02.08		i. Pengamanan/pengawasan BMN - Laporan pengamanan/pengawasan fisik BMN	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perlengkapan
PL.02.09		j. Pelaporan BMN - RKBMN (Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara) - Laporan BMN (<i>unaudited, audited, semesteran, UKPB Kuasa Pengguna Barang (KPB)</i>)	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Perlengkapan
PL.03	4	Bukti-bukti Kepemilikan aset - Sertifikat tanah - Izin Mendirikan Bangunan (IMB) - Pajak Bumi dan Bangunan - Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) - Denah/gambar teknik bangunan - Denah instalasi listrik/saluran air dan gas/jaringan internet	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Perlengkapan
TU	X	KETATAUSAHAAN					
TU.00	1	Keprotokolan					
TU.00.00		a. Upacara Kedinasan (Upacara Bendera, Upacara Hari Besar, Upacara Pelantikan Serah Terima Jabatan dan Peresmian) - Undangan/pemberitahuan - Susunan acara - Berita acara	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Umum dan semua fungsi sekretariat

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> - Naskah serah terima - Surat perintah tugas upacara kedinasan - Sambutan/pidato 					
TU.00.01		b. Kunjungan Kedinasan <ul style="list-style-type: none"> - Kunjungan kedinasan/ kunjungan kerja presiden/ menteri/pimpinan lembaga/ instansi/pejabat eselon I/ tamu negara/pejabat lain/ pegawai - Surat perintah tugas kunjungan kedinasan 	Biasa/Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksanaan	Biro Umum
TU.00.02		c. Agenda Kegiatan Pimpinan <ul style="list-style-type: none"> - Jadwal kegiatan 	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksanaan	Biro Umum
TU.00.03		d. Daftar Nama dan Alamat Pejabat	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksanaan	Biro Umum
TU.01	2.	Perjalanan Dinas Pimpinan					
TU.01.00		a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> - Undangan - Surat Perintah Perjalanan Dinas - Surat Perjalanan Dinas - Agenda acara kegiatan 	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di	Biro Umum dan semua fungsi sekretariat

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
						lingkungan Kejaksaan	
TU.01.01		b. Perjalanan Dinas Luar Negeri - Surat Perintah Perjalanan Dinas - Surat Perjalanan Dinas - Agenda acara kegiatan - Surat permohonan pengurusan paspor, visa, <i>exit permit</i> , izin perjalanan luar negeri	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum dan semua fungsi sekretariat
TU.02	3.	Penyelenggaraan Rapat					
TU.02.00		a. Penyelenggaraan Rapat Pimpinan - Undangan rapat - Materi rapat - Daftar hadir - Notula/risalah	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Umum
TU.02.01		b. Penyelenggaraan Rapat Kerja/ Rapat Koordinasi - Undangan rapat - Materi rapat - Daftar hadir - Notula/risalah	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Umum
TU.02.02		c. Penyelenggaraan Rapat Staf - Undangan rapat - Materi rapat - Daftar hadir - Notula/risalah	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Umum

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
RT	XI	KERUMAHTANGGAAN					
RT.00	1.	Pengurusan Penggunaan Sarana Telekomunikasi: Telepon, Teleks, TV Kabel, Internet Sarana Telekomunikasi lainnya. - Surat permohonan penggunaan - Rekening tagihan - Bukti pembayaran - Surat pemberitahuan keterlambatan membayar/denda - Surat pemberitahuan pemutusan jaringan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Biro Umum, - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
RT.01	2.	Pengurusan Penggunaan Fasilitas Kantor, Ruangan, Gedung, Wisma, Rumah Dinas, Rumah Tahanan, Kendaraan dan Fasilitas Kantor Lainnya - Surat izin/isian formulir penggunaan fasilitas kantor - Surat persetujuan/penolakan penggunaan fasilitas kantor	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Biro Umum - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
RT.02	3.	Penyediaan Konsumsi dan Akomodasi - Surat permohonan penyediaan konsumsi/akomodasi - Surat persetujuan/penolakan penyediaan konsumsi/akomodasi	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja instansi	- Biro Umum - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
RT.03	4.	Pengurusan Kendaraan Dinas					
RT.03.00		a. Pengurusan Surat-surat Kendaraan Dinas	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Biro Umum - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
RT.03.01		b. Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Biro Umum - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
RT.03.02		c. Pengurusan Kehilangan dan Masalah Kendaraan Dinas	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Biro Umum, - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
RT.04	5.	Pemeliharaan Gedung dan Taman					
RT.04.00		a. Berkas Pemeliharaan Pertamanan/ <i>Landscaping</i>	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Biro Umum - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
RT.04.01		b. Berkas Pelaksanaan Penghijauan di Lingkungan Gedung/Kantor	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Biro Umum - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
RT.04.02		c. Berkas Perbaikan Gedung	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Biro Umum - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
RT.04.03		d. Berkas Perbaikan Rumah Dinas/Wisma/Rumah Tahanan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Biro Umum - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
RT.04.04		e. Berkas Pemeliharaan Kebersihan Gedung dan Taman	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Biro Umum - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
RT.05	6.	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon, dan Komputer					
RT.05.00		a. Perbaikan/Pemeliharaan - Surat izin/formulir permohonan perbaikan jaringan listrik, telepon dan komputer - Surat persetujuan/penolakan perbaikan jaringan listrik, telepon, dan komputer - Perbaikan jaringan jaringan listrik, telepon, dan komputer	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Biro Umum - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
RT.05.01		b. Pemasangan - Surat permohonan pemasangan kebutuhan jaringan listrik, telepon dan komputer dari unit kerja - Surat persetujuan/penolakan Pemasangan jaringan listrik, telepon, dan komputer	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Biro Umum - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
RT.06	7.	Pakaian Dinas Pegawai, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, dan Pegawai Lainnya - Usulan pengadaan pakaian dinas - Desain pakaian dinas - Tanda terima pendistribusian pakaian dinas	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	- Biro Umum - Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Negeri - Cabang Kejaksaan Negeri
KM	XII	KEAMANAN DAN KETERTIBAN					
KM.00	1.	Keamanan					
KM.00.00		a. Pengawalan Pimpinan - Surat permintaan pengawalan - Surat tugas pengawalan - Laporan pelaksanaan pengawalan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Umum
KM.00.01		b. Petugas Pengamanan (<i>Security</i>) - Daftar jaga/piket - Daftar petugas - Surat izin keluar/masuk kantor di luar jam kerja - Laporan pelaksanaan tugas pengamanan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum
KM.00.02		c. Laporan Kejadian Gangguan Keamanan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KM.00.03		d. Bantuan Pengamanan - Surat permohonan bantuan pengamanan - Surat tugas pengamanan - Laporan pelaksanaan pengamanan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Umum
KM.01	2.	Ketertiban					
KM.01.00		a. Pengelolaan Parkir - Surat/nota pengurusan dan pengaturan ketertiban parkir - Data kendaraan parkir	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Umum
KM.01.01		b. Ketertiban Lingkungan - Surat/nota pengurusan dan pengaturan ketertiban lingkungan - Laporan ketertiban lingkungan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Umum
KA	XIII	KEARSIPAN					
KA.00	1.	Penciptaan Arsip					
KA.00.00		a. Pengelolaan Surat Masuk - Agenda surat masuk (manual/elektronik) - Tanda terima	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum dan semua fungsi kesekretariatan

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KA.00.01		b. Pengelolaan Surat Keluar - Buku agenda penomoran surat (manual/elektronik) - Daftar surat pertinggal - Nota dinas permintaan unit kerja - Buku pendistribusian	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum dan semua fungsi kesekretariatan
KA.01	2.	Pemeliharaan Arsip					
KA.01.00		a. Pemberkasan - Daftar arsip (daftar berkas dan daftar isi berkas) - Formulir peminjaman arsip - Buku catatan peminjaman arsip	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum dan semua fungsi kesekretariatan
KA.01.01		b. Penataan Arsip - Daftar arsip inaktif - Formulir peminjaman arsip inaktif - Buku catatan peminjaman arsip inaktif	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum, dan semua fungsi kesekretariatan
KA.01.02		c. Penyimpanan - Skema penataan arsip - Peta lokasi penyimpanan arsip - <i>Checklist</i> pengaturan suhu dan temperatur ruang penyimpanan - Pemeliharaan arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi)	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum dan semua fungsi kesekretariatan

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KA.01.03		d. Alih Media Arsip - Berita acara alih media arsip - Daftar arsip yang dialih mediakan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum dan semua fungsi kesekretariatan
KA.01.04		e. Akses Penggunaan Arsip - Buku peminjaman Arsip - Formulir Peminjaman	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Umum dan semua fungsi kesekretariatan
KA.02	3.	Pengelolaan Arsip Vital dan Arsip Terjaga - Daftar arsip vital - Daftar Arsip terjaga - Berita acara penyerahan salinan arsip terjaga	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum dan semua fungsi kesekretariatan
KA.03	4.	Penyusutan Arsip					
KA.03.00		a. Pemindahan arsip inaktif - Berita acara pemindahan arsip - Daftar arsip yang dipindahkan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum dan semua fungsi kesekretariatan
KA.03.01		b. Pemusnahan arsip - Keputusan tim pemusnahan, - Surat usulan pemusnahan,	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja	Biro Umum dan semua fungsi kesekretariatan

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi/pertimbangan/per setujuan pemusnahan dari Kepala ANRI - Surat keputusan pemusnahan - Berita acara pemusnahan - Daftar arsip musnah 				unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	
KA.03.02		c. Penyerahan Arsip Statis <ul style="list-style-type: none"> - Surat usulan penyerahan arsip statis - Rekomendasi/pertimbangan/per setujuan penyerahan arsip - Berita acara penyerahan arsip statis - Daftar arsip usul serah 	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum dan semua fungsi kesekretariatan
KA.04	5.	Pembuatan Sistem Kearsipan (TND, Klasifikasi, JRA, dan SKKAD)	Biasa/Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Publik, - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Umum dan semua fungsi kesekretariatan
KA.05	6.	Pembinaan Kearsipan					
KA.05.00		a. Bimbingan Teknis Kearsipan/ Bimbingan Konsultasi Kearsipan <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan - Persiapan kegiatan - Pelaksanaan kegiatan - Pelaporan pelaksanaan kegiatan 	Biasa/Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Umum dan semua fungsi kesekretariatan
KA.05.01		b. Supervisi/Pengawasan Kearsipan <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan - Persiapan kegiatan - Pelaksanaan kegiatan 	Biasa/Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Publik, - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Umum dan semua fungsi kesekretariatan

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/ JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Pelaporan hasil supervisi/ pengawasan kearsipan				.	
KA.05.02		c. <i>Monitoring</i> - Perencanaan - Persiapan kegiatan - Pelaksanaan kegiatan - Pelaporan hasil <i>monitoring</i>	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Umum dan semua fungsi kesekretariatan
PW	XIV	PENGAWASAN					
PW.00	1.	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
PW.01	2.	Audit/Pengawasan Internal					
PW.01.00		a. Audit Keuangan LHP Audit Keuangan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, - Kejaksaan Tinggi
PW.01.01		b. Audit Kinerja LHP Audit Kinerja	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di	- Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan - Kejaksaan Tinggi

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
						lingkungan Kejaksaan	
PW.02	3.	Reviu					
PW.02.00		a. Reviu Anggaran	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan - Kejaksaan Tinggi
PW.02.01		b. Reviu Kinerja	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan - Kejaksaan Tinggi
PW.02.02		c. Reviu Barang Milik Negara	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan - Kejaksaan Tinggi
PW.03	3.	Pemantauan					
PW.03.00		a. Pemantauan Kegiatan - Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK) - <i>Monitoring</i> reformasi birokrasi - Pengawasan PNB	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan - Kejaksaan Tinggi

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PW.03.01		b. Pemantauan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi/Kerugian Negara <ul style="list-style-type: none"> - Laporan kehilangan - Berita acara kehilangan barang/uang - Surat Keputusan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) - Surat kesanggupan untuk mengganti ke kas negara - Keputusan penghapusan uang dan barang - Laporan penyelesaian TP/ TGR 	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan - Kejaksaan Tinggi
PW.03.02		c. Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan - Kejaksaan Tinggi
PW.04	4.	Pemeriksaan					
PW.04.00		a. Pemeriksaan Terkait Dugaan Disiplin <ul style="list-style-type: none"> - Hasil telaah - Klarifikasi - Inspeksi kasus - Berita acara permintaan keterangan - Usul rencana hukuman disiplin - Keputusan penjatuhan hukuman disiplin - Permohonan banding administratif - Keputusan ketetapan banding 	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum 	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan - Kejaksaan Tinggi

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PW.04.01		b. Inspeksi Umum	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan - Kejaksaan Tinggi
PW.04.02		c. Inspeksi Khusus	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	- Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan - Kejaksaan Tinggi
PW.04.03		d. Inspeksi Pimpinan - Pemeriksaan sesuai perintah pimpinan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
PW.04.04		e. Pendampingan Pengawasan Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi) - Laporan Hasil Pemeriksaan Eksternal atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Komisi Pemberantasan Korupsi	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PW.05	5.	Gratifikasi dan Whistle Blowing System (WBS) - Pelaporan gratifikasi/WBS - SK tim - Laporan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
PW.06	6.	Pengaduan Masyarakat (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR)/Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli))	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
PW.07	7.	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
PW.08	8.	Benturan Kepentingan/Conflict of Interest (CoI) - Peta potensi adanya benturan kepentingan - Tindak lanjut terhadap peta potensi - Keputusan benturan kepentingan - Laporan benturan kepentingan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
PW.09	9.	Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Zona Integritas	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PW.10	10.	Kegiatan Pengawasan Lainnya					
PW.10.00		a. Sosialisasi Pengawasan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
PW.10.01		b. Bimbingan, Konsultasi dan Asistensi Pengawasan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
PW.10.02		c. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
PW.10.03		d. Pemaparan Hasil Pengawasan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
PW.10.04		e. Keikutsertaan dalam Forum APIP	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PW.10.05		f. Satuan Pengawasan Intern (SPI)/Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
DI	XV	DATA DAN INFORMASI					
DI.00	1.	Rencana Strategis/Master Plan Pembangunan Sistem Informasi (SIM)	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
DI.01	2.	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informasi (TI)	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
DI.02	3.	Rancang Bangun Sistem/Desain Sistem Informasi dan Komunikasi	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
DI.03	4.	Dokumentasi Arsitektur					
DI.03.00		a. Aplikasi - Aplikasi persuratan/ <i>esign</i> - <i>Email</i>	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
DI.03.01		b. Infrastruktur dan Keamanan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
DI.03.02		c. Penambahan <i>Storage</i>	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
DI.03.03		d. Pembuatan Konten Media	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
DI.04	5.	Dokumentasi Implementasi, Operasional dan Pemeliharaan					
DI.04.00		a. Implementasi, Operasional dan Pemeliharaan Aplikasi	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
DI.04.01		b. Implementasi, Operasional, Pemeliharaan Infrastruktur, dan Keamanan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
DI.04.02		c. Implementasi Aplikasi Komunikasi/Meeting - Permintaan Video Conference - Permintaan Zoom Meeting	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
DI.05	6.	Perekaman dan Pemutakhiran Data	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik, - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
DI.06	7.	Migrasi dan Integrasi Data/Aplikasi					
DI.06.00		a. Jaringan dan Server - Pasang baru - Relokasi - Pemeliharaan jaringan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
DI.06.01		b. Data dan Aplikasi	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
DI.06.02		c. Evaluasi Teknologi Informasi - Laporan kerusakan - Laporan perangkat - Laporan aplikasi - Laporan jaringan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
DI.07	8.	Keamanan Data					
DI.07.00		a. <i>Backup Data Digital</i>	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
DI.07.01		b. Antivirus	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
DI.07.02		c. <i>Firewall</i>	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
DI.08	9.	Hardware - <i>Pemeliharaan Hardware</i>					
			Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
DI.09	10.	Dokumen <i>Hosting</i> dan <i>Domain</i> - Formulir permintaan <i>hosting</i> - Laporan hasil uji kelayakan - Laporan pelaksanaan <i>hosting</i>	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
DI.10	11.	Pengumpulan dan Pengolah Data	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
DI.11	12.	Analisis Data	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
DI.12	13.	Penyajian dan Pemanfaatan Data	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
DI.13	14.	Database	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
DI.14	15.	Keanggotaan/Langgan/Jaringan	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
PT	XVI	PERPUSTAKAAN					
PT.00	1.	Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka					
PT.00.00		a. Penerimaan Koleksi Bahan Pustaka Deposit	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
PT.00.01		b. Penyerahan Karya Cetak/Karya Rekam Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
PT.00.02		c. Pengelolaan Deposit Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
PT.01	2.	Pengadaan Bahan Pustaka					
PT.01.00		a. Seleksi Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PT.01.01		b. Pemesanan Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
PT.01.02		c. Penerimaan Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
PT.02	3.	Pengolahan Bahan Pustaka					
PT.02.00		a. Inventarisasi Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
PT.02.01		b. Pengelolaan Bahan Pustaka Surplus	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
PT.03	4.	Layanan Bahan Pustaka dan Informasi					
PT.03.00		a. Layanan Peminjaman dan Pengembalian	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
PT.03.01		b. Layanan Pembuatan e-Kliping	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
PT.03.02		c. Layanan Penelusuran Informasi	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
PT.03.03		d. Data dan Statistik Anggota, Pengunjung dan Peminjaman Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
PT.04	5.	Pemeliharaan Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	- Pejabat Administrasi - Pejabat Fungsional - Pengawas Internal	- Publik - Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan	Tidak memiliki dampak yang mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan
KY.	VIII	KESEHATAN YUSTISIAL					
KY.00	1.	Dewan, Badan dan Komite Kesehatan					
KY.00.00		a. Dewan Pengawas - Usulan anggota Dewan Pengawas - Keputusan Dewan Pengawas	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KY.00.01		b. Dewan Pembina - Usulan anggota Dewan Pembina - Keputusan Dewan Pembina	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum
KY.00.02		c. Badan Koordinasi Pendidikan - Usulan anggota badan koordinasi pendidikan - Keputusan badan koordinasi pendidikan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum
KY.00.03		d. Komite - Usulan anggota komite - Keputusan komite	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum
KY.01	2.	Tenaga Kesehatan					
KY.01.00		a. Medik dan Keperawatan - Usulan tenaga medik dan keperawatan - Keputusan tenaga medik dan keperawatan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KY.01.01		b. Non Medik - Usulan tenaga non medik - Keputusan tenaga non medik	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum
KY.01.02		c. Dokter Tamu - Usulan dokter tamu - Keputusan dokter tamu	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum
KY.02	3.	Penunjang Medik					
KY.02.00		a. Laboratorium	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum
KY.02.01		b. Radiologi	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3		4	5	6	7	8
KY.02. 02		c.	Fisioterapi	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum
KY.02. 03		d.	Ambulans	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum
KY.02. 04		e.	Penunjang Medik Lainnya	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum
KY.03	4.	Rekam Medik		Rahasia	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	- Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum,	Biro Umum

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
						termasuk dampak ekonomi makro - Informasi yang terdapat dalam arsip bersifat sensitif bagi lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	
KY.04	5.	Farmasi - Daftar obat - Daftar <i>suplyer</i> - Alat kesehatan habis pakai	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum
KY.05	6.	Kegiatan Akademik dan Riset Layanan Kesehatan - Renstra riset RS - Proposal/TOR - Hasil riset - Evaluasi - Laporan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KY.06	7.	Administrasi Layanan Kesehatan					
KY.06.00		a. Rujukan Fasilitas Kesehatan - Surat penerimaan rujukan - Surat pemberian rujukan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum
KY.06.01		b. Asuransi - Surat permohonan klaim asuransi	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum
KY.06.02		c. Pemulasaran Jenazah - Berita acara pemulasaran jenazah	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum
KY.07	8.	Legalitas Tenaga Kesehatan					
KY.07.00		Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Kesehatan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KY.07.01		Surat Izin Praktik Profesi Tenaga Kesehatan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum
KY.08	9.	Laporan Kegiatan Layanan Kesehatan					
KY.08.00		a. Laporan <i>co assistant (coass)</i> - Permohonan <i>coass</i> - Persetujuan/penolakan - Jadwal pelaksanaan <i>coass</i> - Presensi - Laporan - Surat keterangan melakukan <i>coass</i>	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum
KY.08.01		b. Laporan Kelahiran - Rekapitulasi tingkat kelahiran	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi	Biro Umum
KY.08.02		c. Laporan Kematian - Rekapitulasi tingkat kematian	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi	Biro Umum

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KY.08.03		d. Laporan Kejadian Kecelakaan - Data kejadian kecelakaan - Laporan kejadian kecelakaan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi	Biro Umum
KY.08.04		e. Laporan Perkembangan Pasien - Data statistik - Laporan perkembangan - Rekapitulasi data kesehatan	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum
KY.08.05		f. Laporan Kasus Terbanyak	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum
KY.08.06		g. Laporan Kasus Khusus - Data statistik kasus khusus - Laporan kasus khusus	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum

KLASIFIKASI ARSIP	NO.	NAMA/JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
KY.08.07		h. Laporan Rutin Kesehatan Yustisial	Terbatas	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pengawas Internal	- Pengawas Eksternal - Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan	Biro Umum

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN